

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 1 dan 15

KPK Terus Terima Dukungan (1)

Panitia Angket DPR Menemui BPK

JAKARTA, KOMPAS -- Komisi Pemberantasan Korupsi terus menerima dukungan dari berbagai pihak untuk menghadapi sejumlah langkah yang dilakukan Panitia Angket DPR terhadap KPK. KPK dinilai tidak perlu terlibat dalam angket yang prosesnya penuh kontroversi tersebut.

Sebagai bentuk dukungan terhadap KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Angket KPK, Habu (5/7), akan menggelar aksi di depan Gedung DPR, Dukungan untuk KPK antara lain pernah disampaikan oleh 357 guru besar dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, seniman, dan berbagai kalangan.

Sementara itu, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa UI berencana mendatangi Gedung DPR, 7 Juli mendatang. "Kami ingin menyampaikan aspirasi. Juga sebagai gerakan moral, ingin mengetuk hati para anggota Dewan agar meninjau kembali langkah (anket) ini. Sebab, korupsi perlu diberantas dengan lembaga yang harus diperkuat," tutur Ketua Umum Iluni UI Arief B Hardono. Langkah ini dilakukan karena, menurut dia, yang kini dilakukan panitia ang-

ket merupakan upaya pelemahan terhadap KPK.

Terkait hal itu, Ketua Komite Komunikasi Publik Iluni Fakultas Hukum UI Julius Ibrani menyatakan, KPK tak perlu terlibat dengan proses angket. "Apabila mendapat panggilan (dari panitia angket), tidak perlu hadir. Bahkan, semestinya tidak perlu dijawab," ujarnya.

Sementara itu, panitia angket, kemarin, menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu, besok, panitia angket berencana bertemu dengan terpidana perkara korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pondok Bambu.

Laporan

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama sekitar tiga jam di Kantor BPK tersebut,

(Bersambung ke hal 15 kol 1-5)

SEJUMLAH DUKUNGAN KEPADA KPK

Akademisi

- **17 Maret 2017**
Forum Rektor dan Guru Besar menyampaikan dukungan kepada KPK untuk berani mengungkap kasus korupsi besar KTP elektronik dan menghentikan revisi UU KPK.
- **19 Juni 2017**
Sebanyak 153 guru besar dari sejumlah perguruan tinggi menyatakan dukungan kepada KPK untuk menghadapi hak angket.
- **20 Juni 2017**
Sebanyak 165 guru besar dari 24 universitas se-kawasan timur Indonesia memberikan dukungan untuk KPK dan membentuk Pusat Kajian Antikorupsi.

Masyarakat dan Aktivis

- **5 Mei 2017**
• Berbagai elemen masyarakat menggelar Poetry for Integrity, di KPK dengan seruan "Kami tidak takut!"
• Sejumlah warga mengirimkan karangan bunga ke halaman depan Gedung Merah Putih, KPK, Kuningan, Jakarta.

Petisi Daring

- **7 Juni 2017**
Petisi dukung KPK lewat situs change.org. Petisi itu berjudul "Ayo Lawan Hak Angket DPR terhadap KPK". Hampir 40.000 orang telah menandatangani petisi tersebut.

Budayawan dan Seniman

- **15 Juni 2017**
Massa yang terdiri dari budayawan, seniman, dan aktivis antikorupsi yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Waras membentangkan poster dan spanduk di depan KPK yang menolak hak angket DPR.



Sumber: Litbang "Kompas"/ERN/YOG, dari pemberitaan "Kompas"

INFOGRAFIK ARDIANSYAR

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 1 dan 15

KPK Terus Terima Dukungan (2)

(Sambungan dari halaman 1)

panitia angket mendapatkan pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap KPK dari 2006 hingga 2016. Setelah pertemuan, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan laporan itu kepada ketua panitia angket dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Soerja mengatakan, hasil pemeriksaan keuangan negara terhadap KPK yang diserahkan BPK ke panitia angket berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Menurut Agun, panitia angket menemukan indikasi adanya pelanggaran pengelolaan keuangan yang dilakukan KPK pada periode 2015 dan 2016. Meski KPK mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK dalam periode waktu itu, Agun menegaskan, WTP hanya opini dari hasil audit sehingga tidak menjamin KPK patuh terhadap pengelolaan keuangan negara.

"Kami menemukan ada satu-dua temuan ketidakpatuhan KPK. Hasil audit BPK juga bersifat administratif. Jadi, kami akan melihat apakah KPK telah menjalankan rekomendasi BPK," tutur Agun se usai pertemuan.

Lebih lanjut, ia menyatakan, panitia angket akan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mendalami potensi pelanggaran yang dilakukan KPK.

Anggota panitia angket dari Fraksi PDI-P, Masinton Pasaribu, menyatakan, tidak menampik bahwa muara dari hasil penyelidikan panitia angket terhadap KPK ini akan berujung pada rekomendasi mengkaji ulang keberadaan lembaga KPK. "Kalau



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) membuka pertemuan Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan BPK di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (4/7). Panitia Angket DPR terhadap KPK mendatangi BPK untuk berkonsultasi dan melihat hasil audit BPK terhadap laporan keuangan KPK.

(lembaganya) tidak benar, mau bagaimana lagi," ujarnya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak menampik adanya temuan BPK dalam laporan keuangan KPK. Akan tetapi, semua persoalan itu sudah dijelaskan kepada BPK dan tidak lagi dipermasalahkan.

KPK menghargai dukungan dari sejumlah kalangan. Menurut Febri, respons KPK pada pertengahan Juni lalu terkait permintaan menghadirkan politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani, di panitia angket sudah menunjukkan sikap KPK. Saat itu, KPK menyatakan, permintaan Panitia Angket DPR untuk menghadir-

kan Miryam merupakan bentuk menghalangi proses hukum.

Namun, Febri menegaskan, KPK tetap menghormati DPR. Karena itu, setiap surat permintaan dari DPR juga akan dijawab melalui surat. "Kalau kemudian ada surat lain, kami tetap konsisten akan merespons lagi dengan surat," ujarnya.

Pemeriksaan

KPK terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), yang berkelindan dengan munculnya proses angket di DPR. Dalam pengusutan dugaan korupsi di proyek senilai Rp 5,9

triliun itu, kemarin, KPK memin-takan keterangan tiga anggota DPR periode 2009-2014. Mereka adalah Ganjar Pranowo yang kini Gubernur Jawa Tengah, Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), dan anggota DPR, Malik Haramain.

Ganjar, Olly, dan Malik diminta keterangan terkait hubungan mereka dengan tersangka kasus KTP-el, Andi Agustinus. Mereka juga diklarifikasi terkait dana yang diduga diterima sejumlah pihak di proyek KTP-el.

Ketiganya pun membantah pernah menerima dana dari proyek KTP-el. Malik yang baru pertama kali diperiksa terkait kasus

ini bahkan menegaskan, meski saat itu menjabat sebagai Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Komisi II DPR, ia tidak pernah ditawari atau menerima uang senilai 37.000 dollar AS yang disebut untuknya.

Sementara itu, berkas perkara Miryam tentang pemberian keterangan tidak benar dalam pengusutan kasus korupsi KTP-el telah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi pada Senin lalu. (IAN/AGE/SAN)



Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompas.id